



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun sebagai penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, Renja yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya. Renja juga harus mengantisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan serta mempertimbangkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat.

Periode penyusunan Renja DLH disusun untuk satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan tahun 2024 yang baik, maka perlu disusun Renja DLH yang sistematis dan akuntabel.

Dokumen Renja DLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan program kegiatan tahun 2024 di Kota Balikpapan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2023 didasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
14. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan;
17. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan;
18. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan/pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat memberikan arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, arah kebijakan umum, program pembangunan, sasaran-sasaran strategis dan rencana kerja yang ingin dicapai DLH Kota Balikpapan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program kegiatan 1 tahun anggaran.
2. Sebagai tolak ukur indikator kunci keberhasilan dan media akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan.
3. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat dicapai sesuai target dan berorientasi pada hasil.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 **LATAR BELAKANG**, Mengemukakan gambaran umum tentang Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2023;
- 1.2 **LANDASAN HUKUM**, Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan DLH serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DLH;
- 1.3 **MAKSUD DAN TUJUAN**, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023;
- 1.4 **SISTEMATIKA PENULISAN**, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 serta susunan garis besar isi dokumen;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU

- 2.1 **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLH**, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DLH tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan

yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja DLH sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DLH berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja DLH tahun-tahun sebelumnya;

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLH, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing DLH, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH, memuat uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan DLH dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DLH, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DLH, dampak capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan SDGs, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023, memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra DLH dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DLH;

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT, memuat kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi DLH;

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DLH;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DLH, pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja DLH didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DLH;

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN, pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH dalam pembangunan daerah

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLH

Evaluasi Renja DLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2022 dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2022. Kinerja DLH mengacu pada target pencapaian RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 yaitu meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

IKLH merupakan indikator penting mengevaluasi efektifitas program-program pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri dari tiga indikator yaitu : Indeks Kualitas Lahan (IKL), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA).

Evaluasi hasil capaian Program Tahun 2022 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2022), adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator Program :

Persentase ketersediaan data Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 35,29%, terealisasi sebesar 35,29%.

1.1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah dokumen

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen

1.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen pelaporan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Indikator Program :

Persentase Rimba Kota, Taman Kota, TPU dan Pembibitan dikelola

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 5,74%, terealisasi sebesar 5,74%.

2.1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah Rimba Kota, Taman Kota, TPU dan Pembibitan yang dikelola

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 111 kawasan, terealisasi sebesar 111 kawasan.

2.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kebun Raya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Koleksi

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 485% dari target yang ditetapkan sebesar 500 pohon, terealisasi sebesar 2424 pohon.

2.1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Ruang Terbuka Hijau Kota yang dipelihara dan dikelola (Hutan Kota 18, Taman Kota 60, TPU 32, Pembibitan 2)

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 110 kawasan, terealisasi sebesar 110 kawasan.

3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator Program :

Persentase Penanganan Pengaduan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 152% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 152%.

3.1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

persentase Laporan Pengaduan yang diselesaikan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 152% dari target yang ditetapkan sebesar 70 persen, terealisasi sebesar 106,4%.

3.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

jumlah dokumen penanganan pengaduan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 25 dokumen, terealisasi sebesar 38 dokumen.

4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Program :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 99,63% dari target yang ditetapkan sebesar 64,2, terealisasi sebesar 63,96.

4.1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase pemenuhan baku mutu

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 130% dari target yang ditetapkan sebesar 50%, terealisasi sebesar 65,12%.

4.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen persetujuan teknis dan Jumlah Dokumen persetujuan lingkungan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 130% dari target yang ditetapkan sebesar 43 dokumen, terealisasi sebesar 56 dokumen.

4.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Pelaksanaan & Pelaporan Pengendalian Emisi GRK

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 dokumen, terealisasi sebesar 2 dokumen.

4.2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase Penanggulangan Pencemaran

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 50%, terealisasi sebesar 50%

4.2.1. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah informasi lingkungan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen, terealisasi sebesar 3 dokumen.

4.3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase Pemulihan Pencemaran dan / atau kerusakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 25%, terealisasi sebesar 25%

4.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Penggantain/ Penanaman Pohon

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen, terealisasi sebesar 3 dokumen.

5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator Program :

persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 20, terealisasi sebesar 20%.

1.1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah Penghargaan yang diberikan Kepada Masyarakat

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 26 Penghargaan, terealisasi sebesar 26 Penghargaan.

5.1.1 Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah kegiatan penilaian (CGH, Eco Office, Adiwiyata Kota, Kalpataru Kota)

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4 dokumen kegiatan, terealisasi sebesar 4 dokumen kegiatan.

6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Indikator Program :

persentase limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 48% dari target yang ditetapkan sebesar 51%, terealisasi sebesar 24,48%.

6.1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Indikator Kegiatan :

Jumlah fasilitasi dokumen pemenuhan komitmen

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 80% dari target yang ditetapkan sebesar 15 dokumen, terealisasi sebesar 12 dokumen.

6.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah fasilitasi dokumen pemenuhan komitmen

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 48% dari target yang ditetapkan sebesar 25 dokumen, terealisasi sebesar 12 dokumen.

7. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator Program :

persentase ketaatan usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 101% dari target yang ditetapkan sebesar 40%, terealisasi sebesar 40,36%.

7.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah Usaha/Kegiatan yang melaksanakan kegiatan sesuai izin yang diberikan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 101% dari target yang ditetapkan sebesar 110 kegiatan, terealisasi sebesar 110 kegiatan.

7.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen Fasilitasi pemenuhan persetujuan lingkungan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 80 dokumen, terealisasi sebesar 80 dokumen.

7.1.2. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 30 kegiatan, terealisasi sebesar 31 kegiatan.

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator Program :

persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 306% dari target yang ditetapkan sebesar 20%, terealisasi sebesar 61,15%.

8.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberikan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 306% dari target yang ditetapkan sebesar 52 lembaga, terealisasi sebesar 159 lembaga.

8.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 123% dari target yang ditetapkan sebesar 22 lembaga, terealisasi sebesar 27 lembaga.

8.1.2. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 440% dari target yang ditetapkan sebesar 30 lembaga, terealisasi sebesar 132 lembaga.

8.1.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Kampanye Lingkungan yang diadakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 18 Dokumen kegiatan, terealisasi sebesar 18 Dokumen kegiatan.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator Program :

indeks kinerja pengelolaan sampah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 81,15, terealisasi sebesar 81,15.

9.1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Indikator Kegiatan :

Persentase pengelolaan sampah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 99%, terealisasi sebesar 99%.

9.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen yang disusun

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

9.1.2. Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah kelompok yang dibina

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 113% dari target yang ditetapkan sebesar 30 kelompok, terealisasi sebesar 34 kelompok.

9.1.3. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah tonase Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan Akhir Sampah (Kebersihan, MRF, ITF, TPAS Manggar), Pemeliharaan Kendaraan Operasional (BBM, Service dan Suku Cadang)

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 134.586 ton, terealisasi sebesar 134.586 ton.

9.1.4. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah kegiatan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 6 laporan kegiatan, terealisasi sebesar 6 laporan kegiatan.

9.1.5. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 2088% dari target yang ditetapkan sebesar 8 unit, terealisasi sebesar 167 unit.

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar B, terealisasi sebesar B.

10.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 jenis, terealisasi sebesar 2 jenis.

10.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 12 dokumen, terealisasi sebesar 12 dokumen.

10.2. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Jumlah jenis layanan administrasi retribusi perangkat daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 jenis, terealisasi sebesar 1 jenis.

10.2.1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

jumlah pegawai pendataan dan pendaftaran retribusi

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 23 orang, terealisasi sebesar 23 orang.

10.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pelayanan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 75 orang, terealisasi sebesar 75 orang

10.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Penggantian/ Penanaman Pohon

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 75 orang, terealisasi sebesar 75 orang

10.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 jenis, terealisasi sebesar 2 jenis.

10.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 5 jenis, terealisasi sebesar 5 jenis.

10.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 5 jenis, terealisasi sebesar 5 jenis.

10.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis ATK dan tersedianya makan minum kantor

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 5 jenis, terealisasi sebesar 5 jenis.

10.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis barang cetakan dan pengandaan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4 jenis, terealisasi sebesar 4 jenis.

10.4.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 70% dari target yang ditetapkan sebesar 135 laporan, terealisasi sebesar 94 laporan.

10.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kegiatan :

Jumlah Jenis Layanan Pengadaan BMD

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 67% dari target yang ditetapkan sebesar 6 jenis, terealisasi sebesar 4 jenis.

10.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 50% dari target yang ditetapkan sebesar 2 jenis, terealisasi sebesar 1 jenis.

10.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator Sub Kegiatan :

jumlah jenis pengadaan mebel

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 150% dari target yang ditetapkan sebesar 2 jenis, terealisasi sebesar 3 jenis.

10.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

Jumlah Jenis Layanan Penunjang

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 9 jenis, terealisasi sebesar 9 jenis.

10.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis jasa surat menyurat

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 jenis, terealisasi sebesar 2 jenis.

10.6.2. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 6 jenis, terealisasi sebesar 6 jenis.

10.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Tenaga Administrasi kantor, Tenaga Petugas Kebersihan, Keamanan, Engineering, Pertamanan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 78% dari target yang ditetapkan sebesar 32 orang, terealisasi sebesar 25 orang

10.7. Kegiatan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

Jumlah Jenis Layanan Pengadaan BMD

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 6 jenis, terealisasi sebesar 6 jenis.

10.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Kegiatan :

jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 65% dari target yang ditetapkan sebesar 71 unit, terealisasi sebesar 46 unit.

10.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

jumlah jenis pemeliharaan sarana dan prasarana

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 8 jenis, terealisasi sebesar 8 jenis.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLH

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Capaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Lingkungan Hidup.

Hasil analisis kinerja pelayanan DLH disajikan dalam tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terlampir di bawah ini:

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,33	50,32	77%
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,02	84,29	95%
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	47,32	50	106%
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	81,15	81,15	100%
5	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	27	31,67	117%

Sumber : DLH 2023

Hasil analisis anggaran DLH disajikan dalam tabel 2.2. Realisasi Anggaran DLH Tahun 2022 terlampir di bawah ini :

Tabel 2.2.
Realisasi Anggaran DLH Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran Murni TA.2022	Anggaran Murni TA.2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Anggaran TA.2022	Persentase Realisasi Anggaran TA.2022
				I	II	III	IV		
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	99.996.200	99.996.200	-	18.099.200	50.873.280	29.162.500	98.134.980	98%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	25.903.387.458	28.810.089.958	3.227.134.297	6.012.536.810	6.001.790.762	11.599.091.542	26.840.553.411	93%

3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	119.999.700	119.999.700	6.002.000	33.237.609	15.407.576	43.534.600	98.181.785	82%
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.034.999.265	1.034.999.265	1.006.500	57.095.150	285.585.115	613.589.894	957.276.659	92%
5	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	199.999.700	199.999.700	-	-	-	166.230.600	166.230.600	83%
6	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000	50.000.000	4.723.440	3.350.100	1.562.250	38.731.625	48.367.415	97%
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	105.000.000	105.000.000	4.228.000	36.106.530	16.081.900	42.963.600	99.380.030	95%
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	284.996.500	284.996.500	1.290.000	33.016.500	22.075.500	207.894.759	264.276.759	93%
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	70.565.919.340	88.296.554.996	8.160.659.661	16.409.875.225	14.965.883.986	43.464.441.657,62	83.000.860.530,21	94%
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.802.523.640	17.097.187.893	2.765.978.238	4.261.966.702	3.942.661.708	4.572.001.317	15.542.607.965	91%
	TOTAL	115.166.821.803	136.098.824.212	14.171.022.136	26.865.283.826	25.301.922.077	60.777.642.095	127.115.870.134	93%

Sumber : DLH 2023

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH

Isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun rencana kerja Tahun, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang

Dari hasil analisis terhadap isu-isu internal dan eksternal dalam pembangunan Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan serta merujuk pada data DIKPLHD, Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH adalah sebagai berikut :

- a. Kebersihan Kota
 - Belum optimalnya Kebersihan TPS setelah jam buang sampah
 - Belum berhasilnya pemilahan dan pengelolaan sampah
 - Adanya Timbulan Sampah di Pesisir dan Laut
 - Belum terkelolanya sampah B3 Rumah Tangga
- b. Keindahan Kota
 - Penataan Kota melalui Program Citra Kota
 - Penataan taman kota
 - Penataan tanaman di median jalan
 - Perapian pohon pinggir jalan
- c. Belum optimalnya Pengawasan, Pengendalian dan belum efektifnya Penataan Hukum Lingkungan
- d. Ketidaktaatan Pemanfaatan Ruang
- e. Penataan/Pembukaan Lahan
- f. Kejadian Banjir di DAS Ampal
- g. Penurunan Kualitas Air Sungai

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023, maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD DLH Tahun 2024 dapat dijelaskan dalam tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD DLH Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.570.000.000,00
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	980.000.000,00
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.925.000.000,00
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	63.400.000.000,00
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	650.000.000,00
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	475.000.000,00
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.075.000.000,00
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	400.000.000,00
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	250.000.000,00
10	Program Pengelolaan Persampahan	79.725.000.000,00
	TOTAL PAGU	170.450.000.000,00

Sumber : DLH 2023

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dari hasil Musrembang di semua Kecamatan di Kota Balikpapan tidak ada usulan yang masuk untuk urusan lingkungan hidup, hampir mayoritas usulan kearah pembangunan fisik melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Dan dari hasil forum OPD yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 usulan yang masuk sudah terakomodir di rencana program dan kegiatan yang ada di Tahun 2024.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman, serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Dengan mengacu pada Misi Presiden tahun 2020-2024 dan juga dua pilar dari KLHK di atas, maka dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan pembangunan KLHK, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim
2. Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas telah diselaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDG's*). Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitannya dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK diatas, maka rumusan sasaran strategis KLHK adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih 2019-2023 mempunyai peran penting. Peran penting Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung komitmen nasional untuk menurunkan emisi GRK sebanyak 26% dari Business as Usual (BAU) pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional dan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi emisi GRK sebanyak 30% pada tahun 2030 dari tingkat emisi pada tahun tersebut, merupakan tujuan paling strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Mendukung upaya pemerintah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, sebagai satuan kerja dengan memerhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan lima tahun.

kedepan, menetapkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yakni: Menurunnya emisi gas rumah kaca dari BAU Baseline, dengan sasaran jangka menengahnya yaitu Menurunnya emisi gas rumah kaca, dengan indikator sasaran Penurunan Emisi (ton Co2 eq Juta).

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga maka perlu dilaksanakan kebijakan dan strategi daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah dengan target pengurangan sampah sebesar 30% dan target penanganan sampah sebesar 70% hingga tahun 2025.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan membantu Wali Kota Balikpapan dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan

pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2016 adalah:

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ada pada Visi Nyaman Dihuni dengan isu strategis Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sedangkan pada misi yang terkait adalah misi keempat, yaitu : **Mewujudkan Kota Nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan.**

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran DLH Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatkan Upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Indeks Kualitas Lahan	1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan
2. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	2. Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air
		3. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase jumlah partisipasi masyarakat	4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	- persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH - persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan
4. Meningkatkan Kebersihan Kota	persentase kenaikan tingkat pengelolaan sampah	5. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	- Persentase Pengurangan Sampah
			- Persentase Penanganan Sampah

Sumber : DLH 2023

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan DLH adalah sekumpulan rencana kerja suatu DLH, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DLH dalam pembangunan daerah.

Adapun rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET			
			2024		2025	
			K	Rp	K	Rp
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dokumen perencanaan	persen	75%	980.000.000	87,50%	210.000.000
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang menjadi acuan lingkungan hidup	Dokumen	2	550.000.000	1	175.000.000
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	350.000.000		
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	200.000.000	1	175.000.000
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan lingkungan hidup	dokumen	2	430.000.000	1	35.000.000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	1	400.000.000		
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	dokumen	1	30.000.000	1	35.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	persen	10,61	63.400.000.000	10,63	33.925.000.000
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas tutupan lahan yang menjadi tanggung jawab Kota	hektar	6.802,43	63.400.000.000	6.802,43	33.925.000.000
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	250.000.000	1	275.000.000
Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	309,22	5.000.000.000	309,22	5.500.000.000
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	392,46	58.000.000.000	392,46	28.000.000.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	20	150.000.000	20	150.000.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang terselesaikan	persen	100	250.000.000	100	300.000.000

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	persen	100	250.000.000	100	300.000.000
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	dokumen	35	250.000.000	40	300.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilaksanakan	Persen	100	2.925.000.000	100	3.100.000.000
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan	23	800.000.000	23	800.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	20	150.000.000	20	200.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	3	150.000.000	3	200.000.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	1	500.000.000	1	400.000.000
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan	9	1.800.000.000	9	1.900.000.000
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	Laporan	6	1.700.000.000	6	1.750.000.000
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	3	100.000.000	3	150.000.000
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan	5	325.000.000	5	400.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	2	75.000.000	2	100.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	3	250.000.000	3	300.000.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	persen	100	400.000.000	100	400.000.000
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	penghargaan	26	400.000.000	30	400.000.000
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	4	400.000.000	4	400.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan limbahnya	persen	55,26	650.000.000	65,79	400.000.000
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku Usaha yang melaporkan Limbah B3	usaha/ kegiatan	20	100.000.000	20	100.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara	Dokumen	20	100.000.000	20	100.000.000

Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Limbah B3 yang Dilaksanakan Terintegrasi Secara Elektronik					
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan pengumpulan limbah B3	usaha/ kegiatan	3	550.000.000	3	300.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan dengan kewenangannya	Dokumen	3	550.000.000	3	300.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	persen	31,71	475.000.000	32,93	525.000.000
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang memenuhi persyaratan lingkungan	usaha/ kegiatan	130	475.000.000	135	525.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	90	175.000.000	90	200.000.000
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Orang	4	50.000.000	4	50.000.000
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	40	250.000.000	45	275.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	persen	100	1.075.000.000	100	1.075.000.000
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Kegiatan	62	1.075.000.000	62	1.075.000.000
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	32	250.000.000	32	250.000.000
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	30	450.000.000	30	450.000.000
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	Orang	200	375.000.000	200	375.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	persen	99	79.725.000.000	100	87.675.000.000
Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani	Ton	174106,6	79.490.000.000	175865,25	87.380.000.000
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten /Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	5	450.000.000	5	475.000.000
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	4	400.000.000	4	450.000.000

Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	ton	144727,5	73.250.000.000	146567,1	82.000.000.000
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	11	250.000.000	11	300.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	2	80.000.000	2	85.000.000
Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	dokumen	1	60.000.000	1	70.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	450	5.000.000.000	100	4.000.000.000
Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	dokumen	1	30.000.000	1	35.000.000
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/ Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Rekomendasi	1	30.000.000	1	35.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	kegiatan	3	205.000.000	3	260.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan	4	30.000.000	4	35.000.000
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/ Swasta/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit	4	125.000.000	4	150.000.000
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan	1	50.000.000	1	75.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	78,16	20.570.000.000	78,66	20.605.000.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP	Nilai	73	85.000.000	74	45.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	50.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	10.000.000	1	15.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	25.000.000	2	30.000.000
Administrasi Keuangan	IKM Layanan Administrasi	Nilai	79,09		79,59	

Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat Daerah			12.835.500.000		13.475.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	75	12.835.500.000	80	13.475.000.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi retribusi perangkat daerah	Nilai	82,56	1.700.000.000	83,06	1.750.000.000
Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1	1.700.000.000	1	1.750.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	79,43	302.000.000	79,93	200.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	80	52.000.000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	25	250.000.000	25	200.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	75,61	1.160.000.000	76,11	1.270.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Pomeranian Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10.000.000	5	15.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	200.000.000	10	225.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dokumen	6	250.000.000	6	275.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	50.000.000	4	55.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	145	500.000.000	150	550.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	72,82	875.000.000	73,32	225.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	15	75.000.000	20	100.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	100.000.000	2	125.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	80,13	1.862.500.000	80,63	1.890.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	12.500.000	2	15.000.000
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	600.000.000	6	600.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	1.250.000.000	8	1.275.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	73,87	1.750.000.000	74,37	1.750.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	71	1.500.000.000	71	1.500.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	125	100.000.000	125	100.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000
TOTAL ANGGARAN				170.450.000.000		148.215.000.000

Sumber : DLH 2023

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu Tahun Anggaran.

Dalam prosesnya, Rencana Kinerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, Rencana Strategis (RENSTRA), serta mempertimbangkan isu strategis lingkungan hidup yang mengemuka dan target pencapaian Jaktrada Kota Balikpapan tahun 2024.

Renja DLH ini merupakan masukan utama untuk penetapan rencana kegiatan yang dibiayai dari APBD Kota Balikpapan, untuk Tahun Anggaran 2024. Semoga Rencana Kerja ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup .

Balikpapan, Februari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan,

SUDIRMAN DJAYALEKSANA